



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN I.A  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 56 TAHUN 2014  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG KEPULAUAN NUSA TENGGARA**

**STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL  
DI KEPULAUAN NUSA TENGGARA**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL DI KEPULAUAN NUSA TENGGARA

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.	Provinsi Nusa Tenggara Barat			
I.1.	Mataram	PKN	<ul style="list-style-type: none"><li>- Peternakan</li><li>- Pariwisata</li><li>- Perikanan</li><li>- Pertanian</li><li>- Industri</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan dan meningkatkan fungsi atau potensi PKN Mataram sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional</li><li>b. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKN Mataram sebagai pusat industri pengolahan, industri kerajinan, dan industri jasa hasil peternakan</li><li>c. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKN Mataram sebagai pusat pengembangan pariwisata</li><li>d. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKN Mataram sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan</li><li>e. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKN Mataram sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil hortikultura dan perkebunan</li><li>f. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKN Mataram sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan</li><li>g. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKN Mataram sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan</li><li>h. mengembangkan PKN Mataram berbasis mitigasi dan adaptasi bencana banjir, gelombang pasang, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, dan abrasi</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.A - 2

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>i. mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan untuk mendukung kegiatan industri pengolahan serta perdagangan dan jasa</li><li>j. mengembangkan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan di PKN Mataram</li><li>k. mengendalikan perkembangan fisik PKN Mataram untuk mempertahankan luasan kawasan pertanian tanaman pangan termasuk lahan pertanian pangan berkelanjutan</li><li>l. mengembangkan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Mataram dengan Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Labuhan Lombok, dan Bandar Udara Internasional Lombok</li><li>m. mengembangkan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Mataram berupa pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Timur, Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Labuhan Lombok, serta Bandar Udara Internasional Lombok</li><li>n. mengembangkan dan memelihara pembangkit tenaga listrik untuk melayani PKN Mataram</li><li>o. mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik Tanjung-Ampenan- Jeranjang - Sengkol - Selong - Pringgabaya - Sambelia - Bayan-Tanjung untuk melayani PKN Mataram</li><li>p. mengembangkan, merehabilitasi, dan meningkatkan fungsi jaringan terestrial sebagai bagian dari Jaringan Pelayanan Pulau-Pulau Nusa Tenggara-Maluku-Papua untuk melayani PKN Mataram</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.A - 3

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>q. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKN Mataram</li><li>r. mendayagunakan sumber air pada WS Lombok untuk melayani PKN Mataram</li><li>s. mengembangkan dan memelihara bendungan beserta waduknya (Bendungan Batujai, Bendungan Pengga, Bendungan Mujur II, dan Bendungan Pandanduri Suwangi) untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku bagi PKN Mataram</li><li>t. mengembangkan sarana dan prasarana transportasi untuk meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Gili Tramena dan Sekitarnya, Kawasan Mataram Kota dan Sekitarnya, Kawasan Rinjani dan Sekitarnya, Kawasan Praya-Sade dan Sekitarnya, Kawasan Pantai Selatan Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Sumbawa Barat dan Sekitarnya dengan PKN Mataram</li><li>u. menerapkan teknologi hemat air pada kawasan peruntukan permukiman di PKN Mataram</li><li>v. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKN Mataram sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perikanan laut, pariwisata, industri, dan pertambangan, serta Kawasan Andalan Laut Selat Lombok dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan laut dan pariwisata</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.A - 4

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>w. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKN Mataram sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah vertikal</p> <p>x. mengembangkan prasarana dan sarana berskala regional di PKN Mataram yang meliputi sistem penyediaan air minum (SPAM), sistem jaringan drainase, sistem pengolahan limbah, dan sistem pengelolaan persampahan</p> <p>y. mengembangkan ruang terbuka hijau (RTH) di PKN Mataram</p> <p>z. melarang pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKN Mataram</p>
I.2.	Praya	PKW	<ul style="list-style-type: none"><li>- Peternakan</li><li>- Pariwisata</li><li>- Perikanan</li><li>- Pertanian</li><li>- Industri</li></ul>	<p>a. mengembangkan dan meningkatkan fungsi atau potensi PKW Praya sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor untuk mendukung PKN Mataram</p> <p>b. mengembangkan PKW Praya sebagai pusat industri pengolahan, industri kerajinan, dan industri jasa hasil peternakan</p> <p>c. mengembangkan PKW Praya sebagai pusat pengembangan pariwisata</p> <p>d. mengembangkan PKW Praya sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan</p> <p>e. mengembangkan PKW Praya sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil hortikultura dan perkebunan</p> <p>f. mengembangkan PKW Praya sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.A - 5

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>g. mengembangkan PKW Praya berbasis mitigasi dan adaptasi bencana letusan gunung berapi dan gempa bumi</li><li>h. mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan untuk mendukung kegiatan industri pengolahan serta perdagangan dan jasa</li><li>i. mengembangkan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan di PKW Praya</li><li>j. mengendalikan perkembangan fisik PKW Praya untuk mempertahankan luasan kawasan pertanian tanaman pangan termasuk lahan pertanian pangan berkelanjutan</li><li>k. mengembangkan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Praya dengan Pelabuhan Lembar dan Pelabuhan Labuhan Lombok</li><li>l. meningkatkan fungsi jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Praya dengan Pelabuhan Labuhan Lombok</li><li>m. meningkatkan fungsi jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan PKW Praya dengan Pelabuhan Lembar dan Bandar Udara Internasional Lombok</li><li>n. mengembangkan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Praya berupa pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Timur, Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Labuhan Lombok, serta Bandar Udara Internasional Lombok</li><li>o. mengembangkan dan memelihara pembangkit tenaga listrik untuk melayani PKW Praya</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LA - 6

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>p. mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik Tanjung-Ampenan-Jeranjang-Sengkol-Selong-Pringgabaya-Sambelia-Bayan-Tanjung, Mantang-Gerung, dan Sengkol-Kuta untuk melayani PKW Praya</p> <p>q. mengembangkan, merehabilitasi, dan meningkatkan fungsi jaringan terestrial sebagai bagian dari Jaringan Pelayanan Pulau-Pulau Nusa Tenggara-Maluku-Papua untuk melayani PKW Praya</p> <p>r. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKW Praya</p> <p>s. mendayagunakan sumber air pada WS Lombok untuk melayani PKW Praya</p> <p>t. mengembangkan dan memelihara bendungan beserta waduknya (Bendungan Batujai, Bendungan Pengga, Bendungan Mujur II, dan Bendungan Pandanduri Suwangi) untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku bagi PKW Praya</p> <p>u. mengembangkan sarana dan prasarana transportasi untuk meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Gili Tramena dan Sekitarnya, Kawasan Mataram Kota dan Sekitarnya, Kawasan Rinjani dan Sekitarnya, Kawasan Praya-Sade dan Sekitarnya, Kawasan Pantai Selatan Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Sumbawa Barat dan Sekitarnya dengan PKW Praya</p> <p>v. menerapkan teknologi hemat air pada kawasan peruntukan permukiman di PKW Praya</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

IA - 7

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>w. mengembangkan PKW Praya sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Lombok dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perikanan laut, pariwisata, industri, dan pertambangan, serta Kawasan Andalan Laut Selat Lombok dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan laut dan pariwisata</li><li>x. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Praya sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan</li><li>y. mengembangkan prasarana dan sarana berskala regional di PKW Praya yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem pengolahan limbah, dan sistem pengelolaan persampahan</li><li>z. mengembangkan RTH di PKW Praya</li><li>a.a. melarang pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Praya</li></ul>
1.3.	Raba	PKW	<ul style="list-style-type: none"><li>- Peternakan</li><li>- Pariwisata</li><li>- Perikanan</li><li>- Pertanian</li><li>- Industri</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan dan meningkatkan fungsi atau potensi PKW Raba sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor untuk mendukung PKN Mataram</li><li>b. mengembangkan PKW Raba sebagai pusat industri pengolahan, industri kerajinan, dan industri jasa hasil peternakan</li><li>c. mengembangkan PKW Raba sebagai pusat penelitian dan pengembangan peternakan</li></ul>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

IA - 8

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>d. mengembangkan PKW Raba sebagai pusat pengembangan pariwisata</li><li>e. mengembangkan PKW Raba sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan</li><li>f. mengembangkan PKW Raba sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil hortikultura dan perkebunan</li><li>g. mengembangkan PKW Raba sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan</li><li>h. mengembangkan PKW Raba berbasis mitigasi dan adaptasi bencana tanah longsor, banjir, gelombang pasang, letusan gunung berapi, gempa bumi, gerakan tanah, tsunami, dan abrasi</li><li>i. mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan untuk mendukung kegiatan industri pengolahan serta perdagangan dan jasa</li><li>j. mengembangkan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan di PKW Raba</li><li>k. mengendalikan perkembangan PKW Raba yang berdekatan dengan Kawasan Lindung</li><li>l. mengembangkan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Raba dengan Pelabuhan Bima dan Bandar Udara Muhammad Salahuddin</li><li>m. mengembangkan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Raba berupa pelabuhan penyeberangan di Kota Bima dan Kabupaten Bima, Pelabuhan Bima, serta Bandar Udara Muhammad Salahuddin</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.A - 9

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>n. mengembangkan dan memelihara pembangkit tenaga listrik untuk melayani PKW Raba</li><li>o. mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik Taliwang-Alas/Tano-Labuhan-Empang-Dompu-Woha-Bima-Sape dan Wera-Bima untuk melayani PKW Raba</li><li>p. mengembangkan, merehabilitasi, dan meningkatkan fungsi jaringan terestrial sebagai bagian dari Jaringan Pelayanan Pulau-Pulau Nusa Tenggara-Maluku-Papua untuk melayani PKW Raba</li><li>q. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKW Raba</li><li>r. mendayagunakan sumber air pada WS Sumbawa untuk melayani PKW Raba</li><li>s. mengembangkan dan memelihara bendungan beserta waduknya (Bendungan Rababaka, Bendungan Pelaparado, dan Bendungan Sumi) untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku bagi PKW Raba</li><li>t. mengembangkan sarana dan prasarana transportasi untuk meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Moyo dan Sekitarnya, Kawasan Tambora dan Sekitarnya, serta Kawasan Bima dan Sekitarnya dengan PKW Raba</li><li>u. menerapkan teknologi hemat air pada kawasan peruntukan permukiman di PKW Raba</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.A - 10

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>v. mengembangkan PKW Raba sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Bima dengan sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan</li><li>w. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Raba sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan</li><li>x. mengembangkan prasarana dan sarana berskala regional di PKW Raba yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem pengolahan limbah, dan sistem pengelolaan persampahan</li><li>y. mengembangkan RTH di PKW Raba</li><li>z. melarang pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Raba</li></ul>
I.4.	Sumbawa Besar	PKW	<ul style="list-style-type: none"><li>- Peternakan</li><li>- Pariwisata</li><li>- Perikanan</li><li>- Pertanian</li><li>- Industri</li><li>- Pertambangan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan dan meningkatkan fungsi atau potensi PKW Sumbawa Besar sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor untuk mendukung PKN Mataram</li><li>b. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Sumbawa Besar sebagai pusat industri pengolahan, industri kerajinan, dan industri jasa hasil peternakan</li><li>c. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Sumbawa Besar sebagai pusat pengembangan pariwisata</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.A - 11

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>d. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Sumbawa Besar sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan</li><li>e. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Sumbawa Besar sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil hortikultura dan perkebunan</li><li>f. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Sumbawa Besar sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan</li><li>g. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Sumbawa Besar sebagai pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup</li><li>h. mengembangkan PKW Sumbawa Besar berbasis mitigasi dan adaptasi bencana banjir, gelombang pasang, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, dan abrasi</li><li>i. mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan untuk mendukung kegiatan industri pengolahan serta perdagangan dan jasa</li><li>j. mengembangkan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan di PKW Sumbawa Besar</li><li>k. mengembangkan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Sumbawa Besar dengan Pelabuhan Badas dan Pelabuhan Benete</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

IA - 12

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>l. meningkatkan fungsi jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Sumbawa Besar dengan Pelabuhan Benete</li><li>m. mengembangkan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Sumbawa Besar berupa pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat, Pelabuhan Benete, serta Pelabuhan Badas</li><li>n. mengembangkan dan memelihara pembangkit tenaga listrik untuk melayani PKW Sumbawa Besar</li><li>o. mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik Taliwang-Alas/Tano-Labuhan-Empang-Dompu-Woha-Bima-Sape untuk melayani PKW Sumbawa Besar</li><li>p. mengembangkan, merehabilitasi, dan meningkatkan fungsi jaringan terestrial sebagai bagian dari Jaringan Pelayanan Pulau-Pulau Nusa Tenggara-Maluku-Papua untuk melayani PKW Sumbawa Besar</li><li>q. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKW Sumbawa Besar</li><li>r. mendayagunakan sumber air pada WS Sumbawa untuk melayani PKW Sumbawa Besar</li><li>s. mengembangkan dan memelihara bendungan beserta waduknya (Bendungan Bintang Bano, Bendungan Beringinsila, Bendungan Batu Bulan, Bendungan Mamak, Bendungan Tiu Kulit, dan Bendungan Gapit) untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku bagi PKW Sumbawa Besar</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.A - 13

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>t. mengembangkan sarana dan prasarana transportasi untuk meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Moyo dan Sekitarnya, Kawasan Tambora dan Sekitarnya, serta Kawasan Bima dan Sekitarnya dengan PKW Sumbawa Besar</li><li>u. menerapkan teknologi hemat air pada kawasan peruntukan permukiman di PKW Sumbawa Besar</li><li>v. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Sumbawa Besar sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Sumbawa dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, industri, pertambangan, dan perikanan</li><li>w. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Sumbawa Besar sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan</li><li>x. mengembangkan prasarana dan sarana berskala regional di PKW Sumbawa Besar yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem pengolahan limbah, dan sistem pengelolaan persampahan</li><li>y. mengembangkan RTH di PKW Sumbawa Besar</li><li>z. melarang pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Sumbawa Besar</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

IA - 14

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.	Provinsi Nusa Tenggara Timur			
II.1.	Kupang	PKN	<ul style="list-style-type: none"><li>- Peternakan</li><li>- Pariwisata</li><li>- Perikanan</li><li>- Pertanian</li><li>- Industri</li><li>- Pertambangan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan dan meningkatkan fungsi atau potensi PKN Kupang sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional</li><li>b. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKN Kupang sebagai pusat industri pengolahan, industri kerajinan, dan industri jasa hasil peternakan</li><li>c. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKN Kupang sebagai pusat pengembangan pariwisata</li><li>d. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKN Kupang sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan</li><li>e. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKN Kupang sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil hortikultura dan perkebunan</li><li>f. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKN Kupang sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian hortikultura dan komoditas unggulan perkebunan</li><li>g. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKN Kupang sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan</li><li>h. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKN Kupang sebagai pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.A - 15

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>i. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKN Kupang sebagai pusat industri pengolahan hasil minyak dan gas yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup</li><li>j. mengembangkan PKN Kupang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana tanah longsor, gelombang pasang, gempa bumi, gerakan tanah, tsunami, dan abrasi</li><li>k. mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan untuk mendukung kegiatan industri pengolahan serta perdagangan dan jasa</li><li>l. mengembangkan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan di PKN Kupang</li><li>m. mengendalikan perkembangan PKN Kupang yang berdekatan dengan Kawasan Lindung</li><li>n. mengembangkan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Kupang dengan Pelabuhan Tenau dan Bandar Udara Eltari</li><li>o. mengembangkan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Kupang berupa pelabuhan penyeberangan di Kota Kupang, Pelabuhan Tenau, dan Bandar Udara Eltari</li><li>p. mengembangkan dan memelihara pembangkit tenaga listrik untuk melayani PKN Kupang</li><li>q. mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik Bolok-Maulafa-Naibonat-Soc/Nonohonis-Kefamenanu-Atambua-Atapupu untuk melayani PKN Kupang</li></ul>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.A - 16

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>r. mengembangkan, merehabilitasi, dan meningkatkan fungsi jaringan terestrial sebagai bagian dari Jaringan Pelayanan Pulau-Pulau Nusa Tenggara-Maluku-Papua untuk melayani PKN Kupang</li><li>s. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKN Kupang</li><li>t. mendayagunakan sumber air pada WS Noelmina untuk melayani PKN Kupang</li><li>u. mengembangkan dan memelihara bendungan beserta waduknya (Bendungan Temef, Bendungan Tilong, Bendungan Raknamo, dan Bendungan Kolhua) untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku bagi PKN Kupang</li><li>v. mengembangkan sarana dan prasarana transportasi untuk meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Kupang-Soe dan Sekitarnya serta Kawasan Nembrala-Rote Ndao dan Sekitarnya dengan PKN Kupang</li><li>w. mengendalikan alih fungsi dan merehabilitasi kawasan pantai berhutan bakau</li><li>x. menerapkan teknologi hemat air pada kawasan peruntukan permukiman di PKN Kupang</li><li>y. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKN Kupang sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, perikanan laut, dan pertambangan, serta Kawasan Andalan Laut Sawu dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan, dan pariwisata</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

IA - 17

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>z. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKN Kupang sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya ke arah vertikal</li><li>a.a. mengembangkan prasarana dan sarana berskala regional di PKN Kupang yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem pengolahan limbah, dan sistem pengelolaan persampahan</li><li>a.b. mengembangkan RTH di PKN Kupang</li><li>a.c. melarang pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKN Kupang</li></ul>
II.2.	Soe	PKW	<ul style="list-style-type: none"><li>- Peternakan</li><li>- Pariwisata</li><li>- Pertanian</li><li>- Industri</li><li>- Pertambangan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan dan meningkatkan fungsi atau potensi PKW Soe sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor untuk mendukung PKN Kupang</li><li>b. mengembangkan PKW Soe sebagai pusat industri pengolahan, industri kerajinan, dan industri jasa hasil peternakan</li><li>c. mengembangkan PKW Soe sebagai pusat penelitian dan pengembangan peternakan</li><li>d. mengembangkan PKW Soe sebagai pusat pengembangan pariwisata</li><li>e. mengembangkan PKW Soe sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil hortikultura dan perkebunan</li><li>f. mengembangkan PKW Soe sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.A - 18

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>g. mengembangkan PKW Soe sebagai pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup</li><li>h. mengembangkan PKW Soe berbasis mitigasi dan adaptasi bencana tanah longsor, banjir, gempa bumi, dan gerakan tanah</li><li>i. mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan untuk mendukung kegiatan industri pengolahan serta perdagangan dan jasa</li><li>j. mengembangkan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan di PKW Soe</li><li>k. mengendalikan perkembangan PKW Soe yang berdekatan dengan Kawasan Lindung</li><li>l. mengembangkan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Soe dengan Pelabuhan Tenau dan Bandar Udara Eltari</li><li>m. mengembangkan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Soe berupa pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Kupang, Pelabuhan Tenau, dan Bandar Udara Eltari</li><li>n. mengembangkan dan memelihara pembangkit tenaga listrik untuk melayani PKW Soe</li><li>o. mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik Bolok-Maulafa-Naibonat-Soe/Nonohonis-Kefamenanu-Atambua-Atapupu untuk melayani PKW Soe</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

IA - 19

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>p. mengembangkan, merehabilitasi, dan meningkatkan fungsi jaringan terestrial sebagai bagian dari Jaringan Pelayanan Pulau-Pulau Nusa Tenggara-Maluku-Papua untuk melayani PKW Soe</p> <p>q. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKW Soe</p> <p>r. mendayagunakan sumber air pada WS Noelmina untuk melayani PKW Soe</p> <p>s. mengembangkan dan memelihara bendungan beserta waduknya (Bendungan Temef, Bendungan Tilong, Bendungan Raknamo, dan Bendungan Kolhua) untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku bagi PKW Soe</p> <p>t. mengembangkan sarana dan prasarana transportasi untuk meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Kupang-Soe dan Sekitarnya serta Kawasan Nembrala-Rote Ndao dan Sekitarnya dengan PKW Soe</p> <p>u. menerapkan teknologi hemat air pada kawasan peruntukan permukiman di PKW Soe</p> <p>v. mengembangkan PKW Soe sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, perikanan laut, dan pertambangan</p> <p>w. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Soe sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.A - 20

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>x. mengembangkan prasarana dan sarana berskala regional di PKW Soe yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem pengolahan limbah, dan sistem pengelolaan persampahan</li><li>y. mengembangkan RTH di PKW Soe</li><li>z. melarang pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Soe</li></ul>
II.3.	Kefamenanu	PKW/ PKSN	<ul style="list-style-type: none"><li>- Peternakan</li><li>- Pariwisata</li><li>- Pertanian</li><li>- Industri</li><li>- Pertambangan</li><li>- Pertahanan dan keamanan negara</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan dan meningkatkan fungsi atau potensi PKW Kefamenanu sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor untuk mendukung PKN Kupang</li><li>b. mengembangkan PKW Kefamenanu sebagai pusat industri pengolahan, industri kerajinan, dan industri jasa hasil peternakan</li><li>c. mengembangkan PKW Kefamenanu sebagai pusat pengembangan pariwisata</li><li>d. mengembangkan PKW Kefamenanu sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil hortikultura dan perkebunan</li><li>e. mengembangkan PKW Kefamenanu sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan</li><li>f. mengembangkan PKW Kefamenanu sebagai pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.A - 21

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>g. mengembangkan PKSN Kefamenanu sebagai pusat pengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional, simpul transportasi, serta pusat promosi dan pemasaran ke negara yang berbatasan</li><li>h. memanfaatkan ruang untuk kegiatan kerja sama militer dengan negara lain secara terbatas dengan memperhatikan kondisi fisik lingkungan dan sosial budaya masyarakat</li><li>i. mengembangkan PKW Kefamenanu berbasis mitigasi dan adaptasi bencana tanah longsor, banjir, gempa bumi, dan gerakan tanah</li><li>j. mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan untuk mendukung kegiatan industri pengolahan serta perdagangan dan jasa</li><li>k. mengembangkan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan di PKW Kefamenanu</li><li>l. mengendalikan perkembangan PKW Kefamenanu yang berdekatan dengan Kawasan Lindung</li><li>m. mengembangkan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Kefamenanu dengan Pelabuhan Atapupu dan Bandar Udara Haliwen</li><li>n. mengembangkan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKSN Kefamenanu berupa Pelabuhan Atapupu dalam satu sistem dengan Pelabuhan Wini dan Bandar Udara Haliwen</li><li>o. mengembangkan dan memelihara pembangkit tenaga listrik untuk melayani PKW Kefamenanu</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.A - 22

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>p. mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik Bolok-Kupang-Mulafa-Naibonat-Soe/Nonohonis-Kefamenanu-Atambua-Atapupu untuk melayani PKW Kefamenanu</p> <p>q. mengembangkan, merehabilitasi, dan meningkatkan fungsi jaringan terestrial sebagai bagian dari Jaringan Pelayanan Pulau-Pulau Nusa Tenggara-Maluku-Papua untuk melayani PKW Kefamenanu</p> <p>r. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKW Kefamenanu</p> <p>s. mendayagunakan sumber air pada WS Benanain untuk melayani PKW Kefamenanu</p> <p>t. mengembangkan dan memelihara bendungan beserta waduknya (Bendungan Temef, Bendungan Tilong, dan Bendungan Raknamo) untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku bagi PKW Kefamenanu</p> <p>u. mengembangkan sarana dan prasarana transportasi untuk meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Kupang-Soe dan Sekitarnya serta Kawasan Nembrala-Rote Ndao dan Sekitarnya dengan PKW Kefamenanu</p> <p>v. menerapkan teknologi hemat air pada kawasan peruntukan permukiman di PKW Kefamenanu</p> <p>w. mengembangkan PKW Kefamenanu sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, perikanan laut, dan pertambangan</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

IA - 23

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>x. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Kefamenanu sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan</li><li>y. mengembangkan prasarana dan sarana berskala regional di PKW Kefamenanu yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem pengolahan limbah, dan sistem pengelolaan persampahan</li><li>z. mengembangkan RTH di PKW Kefamenanu</li><li>aa. melarang pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW/PKSN Kefamenanu</li></ul>
II.4.	Ende	PKW	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pariwisata</li><li>- Perikanan</li><li>- Perkebunan</li><li>- Pertanian</li><li>- Kehutanan</li><li>- Industri</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan dan meningkatkan fungsi atau potensi PKW Ende sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor untuk mendukung PKN Kupang</li><li>b. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Ende sebagai pusat pengembangan pariwisata</li><li>c. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Ende sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan</li><li>d. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Ende sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil hortikultura dan perkebunan</li><li>e. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Ende sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan</li><li>f. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Ende sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan non kayu yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan</li></ul>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.A - 24

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>g. mengembangkan PKW Ende berbasis mitigasi dan adaptasi bencana tanah longsor, banjir, gelombang pasang, letusan gunung berapi, gempa bumi, gerakan tanah, tsunami, dan abrasi</li><li>h. mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan untuk mendukung kegiatan industri pengolahan serta perdagangan dan jasa</li><li>i. mengembangkan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan di PKW Ende</li><li>j. mengembangkan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Ende dengan Pelabuhan Ippi, Pelabuhan Ende, dan Bandar Udara Hasan Aroeboesman</li><li>k. mengembangkan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Ende berupa pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Ende, Pelabuhan Ippi dalam satu sistem dengan Pelabuhan Ende dan Bandar Udara Hasan Aroeboesman</li><li>l. mengembangkan dan memelihara pembangkit tenaga listrik untuk melayani PKW Ende</li><li>m. mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik Labuan Bajo-Ruteng-Bajawa-Ropa-Maumere, Ropa-Ende, dan Sokoria-Ende untuk melayani PKW Ende</li><li>n. mengembangkan, merhabilitasi, dan meningkatkan fungsi jaringan terestrial sebagai bagian dari Jaringan Pelayanan Pulau-Pulau Nusa Tenggara-Maluku-Papua untuk melayani PKW Ende</li><li>o. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKW Ende</li><li>p. mendayagunakan sumber air pada WS Flores untuk melayani PKW Ende</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

IA - 25

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>q. mengembangkan sarana dan prasarana transportasi untuk meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Bajawa dan Sekitarnya, Kawasan Ende-Kelimutu dan Sekitarnya, serta Kawasan Maumere-Sikka dan Sekitarnya dengan PKW Ende</li><li>r. menerapkan teknologi hemat air pada kawasan peruntukan permukiman di PKW Ende</li><li>s. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Ende sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Maumere-Ende dengan sektor unggulan kehutanan, pariwisata, industri, perikanan, pertanian, dan perkebunan, serta Kawasan Andalan Laut Sumba dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata</li><li>t. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Ende sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan</li><li>u. mengembangkan prasarana dan sarana berskala regional di PKW Ende yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem pengolahan limbah, dan sistem pengelolaan persampahan</li><li>v. mengembangkan RTH di PKW Ende</li><li>w. melarang pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Ende</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.A - 26

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.5.	Maumere	PKW	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pariwisata</li><li>- Perikanan</li><li>- Perkebunan</li><li>- Pertanian</li><li>- Industri</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan dan meningkatkan fungsi atau potensi PKW Maumere sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor untuk mendukung PKN Kupang</li><li>b. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Maumere sebagai pusat pengembangan pariwisata</li><li>c. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Maumere sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan</li><li>d. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Maumere sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil hortikultura dan perkebunan</li><li>e. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Maumere sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan</li><li>f. mengembangkan PKW Maumere berbasis mitigasi dan adaptasi bencana tanah longsor, gelombang pasang, letusan gunung berapi, gempa bumi, gerakan tanah, tsunami, dan abrasi</li><li>g. mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan untuk mendukung kegiatan industri pengolahan serta perdagangan dan jasa</li><li>h. mengembangkan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan di PKW Maumere</li><li>i. mengendalikan perkembangan PKW Maumere yang berdekatan dengan Kawasan Lindung</li><li>j. mengembangkan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Maumere dengan Pelabuhan Lorensius Say, Pelabuhan Larantuka, dan Bandar Udara Frans Seda</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.A - 27

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>k. mengembangkan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Maumere berupa Pelabuhan Lorensius Say dan Bandar Udara Frans Seda</p> <p>l. mengembangkan dan memelihara pembangkit tenaga listrik untuk melayani PKW Maumere</p> <p>m. mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik Labuan Bajo-Ruteng-Bajawa-Ropa-Maumere untuk melayani PKW Maumere</p> <p>n. mengembangkan, merehabilitasi, dan meningkatkan fungsi jaringan terestrial sebagai bagian dari Jaringan Pelayanan Pulau-Pulau Nusa Tenggara-Maluku-Papua untuk melayani PKW Maumere</p> <p>o. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKW Maumere</p> <p>p. mendayagunakan sumber air pada WS Flores untuk melayani PKW Maumere</p> <p>q. mengembangkan sarana dan prasarana transportasi untuk meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Bajawa dan Sekitarnya, Kawasan Ende-Kelimutu dan Sekitarnya, serta Kawasan Maumere-Sikka dan Sekitarnya dengan PKW Maumere</p> <p>r. menerapkan teknologi hemat air pada kawasan peruntukan permukiman di PKW Maumere</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.A - 28

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>s. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Maumere sebagai pusat pengembangan Andalan Maumere-Ende dengan sektor unggulan kehutanan, pariwisata, industri, perikanan, pertanian, dan perkebunan, serta Kawasan Andalan Laut Flores dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata</li><li>t. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Maumere sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangannya ke arah horizontal dikendalikan</li><li>u. mengembangkan prasarana dan sarana berskala regional di PKW Maumere yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem pengolahan limbah, dan sistem pengelolaan persampahan</li><li>v. mengembangkan RTH di PKW Maumere</li><li>w. melarang pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Maumere</li></ul>
II.6.	Waingapu	PKW	<ul style="list-style-type: none"><li>- Peternakan</li><li>- Pariwisata</li><li>- Perikanan</li><li>- Perkebunan</li><li>- Pertanian</li><li>- Industri</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan dan meningkatkan fungsi atau potensi PKW Waingapu sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor untuk mendukung PKN Kupang</li><li>b. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Waingapu sebagai pusat industri pengolahan, industri kerajinan, dan industri jasa hasil peternakan</li><li>c. mengembangkan PKW Waingapu sebagai pusat pengembangan pariwisata</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.A - 29

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>d. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Waingapu sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan</li><li>e. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Waingapu sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil hortikultura dan perkebunan</li><li>f. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Waingapu sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan</li><li>g. mengembangkan PKW Waingapu berbasis mitigasi dan adaptasi bencana tanah longsor, banjir, gelombang pasang, gempa bumi, gerakan tanah, tsunami, dan abrasi</li><li>h. mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan untuk mendukung kegiatan industri pengolahan serta perdagangan dan jasa</li><li>i. mengembangkan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan di PKW Waingapu</li><li>j. mengembangkan jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKW Waingapu dengan Pelabuhan Waingapu dan Bandar Udara Umu Mehang Kunda</li><li>k. mengembangkan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Waingapu berupa pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Sumba Timur, Pelabuhan Waingapu, dan Bandar Udara Umu Mehang Kunda</li><li>l. mengembangkan dan memelihara pembangkit tenaga listrik untuk melayani PKW Waingapu</li></ul>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

IA - 31

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>u. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Waingapu sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan</li><li>v. mengembangkan prasarana dan sarana berskala regional di PKW Waingapu yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem pengolahan limbah, dan sistem pengelolaan persampahan</li><li>w. mengembangkan RTH di PKW Waingapu</li><li>x. melarang pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Waingapu</li></ul>
II.7.	Ruteng	PKW	<ul style="list-style-type: none"><li>- Peternakan</li><li>- Pariwisata</li><li>- Perikanan</li><li>- Perkebunan</li><li>- Pertanian</li><li>- Pertambangan</li><li>- Industri</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan dan meningkatkan fungsi atau potensi PKW Ruteng sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor untuk mendukung PKN Kupang</li><li>b. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Ruteng sebagai pusat industri pengolahan, industri kerajinan, dan industri jasa hasil peternakan</li><li>c. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Ruteng sebagai pusat pengembangan pariwisata</li><li>d. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Ruteng sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan</li><li>e. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Ruteng sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil hortikultura dan perkebunan</li></ul>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

IA - 32

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>f. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Ruteng sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan</li><li>g. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Ruteng sebagai pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup</li><li>h. mengembangkan PKW Ruteng berbasis mitigasi dan adaptasi bencana tanah longsor, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, dan gerakan tanah</li><li>i. mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan untuk mendukung kegiatan industri pengolahan serta perdagangan dan jasa</li><li>j. mengembangkan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan di PKW Ruteng</li><li>k. mengendalikan perkembangan PKW Ruteng yang berdekatan dengan Kawasan Lindung</li><li>l. mengembangkan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Ruteng berupa pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Manggarai, Pelabuhan Marapokot, dan Bandar Udara Mbay</li><li>m. mengembangkan dan memelihara pembangkit tenaga listrik untuk melayani PKW Ruteng</li><li>n. mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik Labuan Bajo-Ruteng-Bajawa-Ropa-Maumere untuk melayani PKW Ruteng</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.A - 33

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>o. mengembangkan, merehabilitasi, dan meningkatkan fungsi jaringan terestrial sebagai bagian dari Jaringan Pelayanan Pulau-Pulau Nusa Tenggara-Maluku-Papua untuk melayani PKW Ruteng</li><li>p. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKW Ruteng</li><li>q. mendayagunakan sumber air pada WS Flores untuk melayani PKW Ruteng</li><li>r. mengembangkan sarana dan prasarana transportasi untuk meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Komodo dan Sekitarnya, Kawasan Labuan Bajo dan Sekitarnya, serta Kawasan Ruteng dan Sekitarnya dengan PKW Ruteng</li><li>s. menerapkan teknologi hemat air pada kawasan peruntukan permukiman di PKW Ruteng</li><li>t. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Ruteng sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Ruteng-Bajawa dengan sektor unggulan perkebunan, perikanan, pertambangan, pariwisata, dan pertanian</li><li>u. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Ruteng sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangannya ke arah horizontal dikendalikan</li><li>v. mengembangkan prasarana dan sarana berskala regional di PKW Ruteng yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem pengolahan limbah, dan sistem pengelolaan persampahan</li><li>w. mengembangkan RTH di PKW Ruteng</li></ul>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.A - 35

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>i. mengembangkan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Labuan Bajo dengan Pelabuhan Labuan Bajo dan Bandar Udara Komodo</li><li>j. mengembangkan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Labuan Bajo berupa pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Manggarai Barat, Pelabuhan Labuan Bajo, dan Bandar Udara Komodo</li><li>k. mengembangkan dan memelihara pembangkit tenaga listrik untuk melayani PKW Labuan Bajo</li><li>l. mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik Labuan Bajo-Ruteng-Bajawa-Ropa-Maumere yang melayani PKW Labuan Bajo</li><li>m. mengembangkan, merehabilitasi, dan meningkatkan fungsi jaringan terestrial sebagai bagian dari Jaringan Pelayanan Pulau-Pulau Nusa Tenggara-Maluku-Papua untuk melayani PKW Labuan Bajo</li><li>n. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKW Labuan Bajo</li><li>o. mengembangkan sumber air pada WS Flores untuk melayani PKW Labuan Bajo</li><li>p. mengendalikan alih fungsi dan merehabilitasi kawasan pantai berhutan bakau</li><li>q. mengembangkan sarana dan prasarana transportasi untuk meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Komodo dan Sekitarnya, Kawasan Labuan Bajo dan Sekitarnya, serta Kawasan Ruteng dan Sekitarnya dengan PKW Labuan Bajo</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.A - 36

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>r. menerapkan teknologi hemat air pada kawasan peruntukan permukiman di PKW Labuan Bajo</li><li>s. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Labuan Bajo sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Komodo dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, perkebunan, industri, dan perikanan</li><li>t. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKW Labuan Bajo sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan</li><li>u. mengembangkan prasarana dan sarana berskala regional di PKW Labuan Bajo yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem pengolahan limbah, dan sistem pengelolaan persampahan</li><li>v. mengembangkan RTH di PKW Labuan Bajo</li><li>w. melarang pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Labuan Bajo</li></ul>
II.9.	Atambua	PKSN	- Pertahanan dan keamanan negara	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKSN Atambua sebagai pusat pengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional, simpul transportasi, serta pusat promosi dan pemasaran ke negara yang berbatasan</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.A - 37

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"><li>- Peternakan</li><li>- Pariwisata</li><li>- Pertanian</li><li>- Pertambangan</li><li>- Industri</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>b. memanfaatkan ruang untuk kegiatan kerja sama militer dengan negara lain secara terbatas dengan memperhatikan kondisi fisik lingkungan dan sosial budaya masyarakat</li><li>c. mengembangkan PKSN Atambua sebagai pusat industri pengolahan, industri kerajinan, dan industri jasa hasil peternakan dilakukan</li><li>d. mengembangkan PKSN Atambua sebagai pusat pengembangan pariwisata</li><li>e. mengembangkan PKSN Atambua sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan</li><li>f. mengembangkan PKSN Atambua sebagai pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup</li><li>g. mengembangkan PKSN Atambua berbasis mitigasi dan adaptasi bencana tanah longsor, banjir, gempa bumi, dan gerakan tanah</li><li>h. mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan untuk mendukung kegiatan industri pengolahan serta perdagangan dan jasa</li><li>i. mengembangkan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan di PKSN Atambua</li><li>j. mengendalikan perkembangan PKSN Atambua yang berdekatan dengan Kawasan Lindung</li><li>k. mengembangkan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKSN Atambua dengan Pelabuhan Atapupu dan Bandar Udara Haliwen</li><li>l. mengembangkan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKSN Atambua berupa pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Belu, Pelabuhan Atapupu dalam satu sistem dengan Pelabuhan Wini, dan Bandar Udara Haliwen</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

IA - 38

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>m. mengembangkan dan memelihara pembangkit tenaga listrik untuk melayani PKSN Atambua</li><li>n. mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik Bolok-Kupang-Mulafa-Najbonat-Soe/Nonohonis-Kefamenanu-Atambua-Atapupu untuk melayani PKSN Atambua</li><li>o. mengembangkan, merehabilitasi, dan meningkatkan fungsi jaringan terestrial sebagai bagian dari Jaringan Pelayanan Pulau-Pulau Nusa Tenggara-Maluku-Papua untuk melayani PKSN Atambua</li><li>p. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKSN Atambua</li><li>q. mendayagunakan sumber air pada WS Benanain untuk melayani PKSN Atambua</li><li>r. mengembangkan sarana dan prasarana transportasi untuk meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Kupang-Soe dan Sekitarnya serta Kawasan Nembrala-Rote Ndao dan Sekitarnya dengan PKSN Atambua</li><li>s. menerapkan teknologi hemat air pada kawasan peruntukan permukiman di PKSN Atambua</li><li>t. mengembangkan PKSN Atambua sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kupang dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, perikanan laut, dan pertambangan</li><li>u. mengembangkan prasarana dan sarana berskala regional di PKSN Atambua yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem pengolahan limbah, dan sistem pengelolaan persampahan</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.A - 39

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				v. mengembangkan RTH di PKSN Atambua w. melarang pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKSN Atambua
II.10.	Kalabahi	PKSN	- Pertahanan dan keamanan negara - Pariwisata - Perikanan - Industri	a. mengembangkan PKSN Kalabahi sebagai pusat pengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional, simpul transportasi, serta pusat promosi dan pemasaran ke negara yang berbatasan b. memanfaatkan ruang untuk kegiatan kerja sama militer dengan negara lain secara terbatas dengan memperhatikan kondisi fisik lingkungan dan sosial budaya masyarakat c. mengembangkan PKSN Kalabahi sebagai pusat pengembangan pariwisata d. mengembangkan PKSN Kalabahi sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan e. mengembangkan PKSN Kalabahi berbasis mitigasi dan adaptasi bencana tanah longsor, gelombang pasang, gempa bumi, gerakan tanah, tsunami, dan abrasi f. mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan untuk mendukung kegiatan industri pengolahan serta perdagangan dan jasa g. mengembangkan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan di PKSN Kalabahi h. mengembangkan jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKSN Kalabahi dengan Pelabuhan Kalabahi dan Pelabuhan Maritaing





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.A - 40

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"><li>i. mengembangkan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKSN Kalabahi berupa pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Alor, dan Pelabuhan Kalabahi dalam satu sistem dengan Pelabuhan Maritaing</li><li>j. mengembangkan dan memelihara pembangkit tenaga listrik untuk melayani PKSN Kalabahi</li><li>k. mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik untuk melayani PKSN Kalabahi</li><li>l. mengembangkan, merhabilitasi, dan meningkatkan fungsi jaringan terestrial sebagai bagian dari Jaringan Pelayanan Pulau-Pulau Nusa Tenggara-Maluku-Papua untuk melayani PKSN Kalabahi</li><li>m. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKSN Kalabahi</li><li>n. mendayagunakan sumber air berbasis WS untuk melayani PKSN Kalabahi</li><li>o. mengendalikan alih fungsi dan merhabilitasi kawasan pantai berhutan bakau</li><li>p. mengembangkan sarana dan prasarana transportasi untuk meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Larantuka dan Sekitarnya, Kawasan Lamarela-Lembata dan Sekitarnya, serta Kawasan Alor-Kalabahi dan Sekitarnya dengan PKSN Kalabahi</li><li>q. menerapkan teknologi hemat air pada kawasan peruntukan permukiman di PKSN Kalabahi</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.A - 41

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				r. mengembangkan prasarana dan sarana berskala regional di PKSN Kalabahi yang meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem pengolahan limbah, dan sistem pengelolaan persampahan s. mengembangkan RTH di PKSN Kalabahi t. melarang pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKSN Kalabahi

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Perekonomian,



Ratih Nurdiati